

# Karikatur.Perempuan di Pilpres 2014

Published Mei 31, 2012 Artikel Pengamat      Ditutup

Tag:Karikatur Perempuan di Pilpres 2014, Robi Cahyadi Kurniawan

Oleh **Robi Cahyadi Kurniawan**

Adu wacana menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mulai gencar. Opini terbaru yang menimbulkan pro-kontra adalah upaya mengusung Ani Yudhonono sebagai calon presiden.

Pihak pendukung berpendapat setiap warga negara berhak terlibat dalam proses politik tanpa melihat gender. Pihak yang tak sepakat memakai draf RUU Pemilihan Kepala Daerah dalam Pasal 12 poin p tentang persyaratan sebagai calon gubernur: "Tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan."

Hal sama juga dipertegas dalam Pasal 70 poin p tentang persyaratan calon bupati/wali kota: "Tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur dan bupati/wali kota kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan."

Pihak yang menolak pencalonan Ani Yudhoyono mempertanyakan kalau dalam pemilihan lokal saja primordialisme (dinasti politik) dilarang, mengapa dalam Pilpres diperbolehkan?

Lahirnya poin p dalam draf RUU Pilkada didasarkan pada evaluasi bahwa ikatan keluarga atau primordialisme politik sangat kental terjadi dan menjadi faktor penting kemenangan pilkada. Keterlibatan perempuan dalam kancah politik lokal tak lepas dari primordialisme tersebut.

## **Perempuan Berpolitik**

Pilkada di daerah-daerah dengan ciri khas masing-masing telah melahirkan pemimpin perempuan. Untuk level provinsi diwakili Ratu Atut Chosiyah yang menjabat gubernur Banten (2007—2012 dan 2012—2017). Untuk wali kota diwakili Suryatati A. Manan yang menjabat bupati Tanjungpinang (2008—2013).

Selain itu, ada sejumlah perempuan yang sedang dan pernah menjabat kepala daerah, di antaranya Bupati Karanganyar Rina Iriani, Bupati Banyuwangi Ratna Ani, Bupati Bolaang Mongondow Marlina Moha, Bupati Tuban Heni Relawaty, Bupati Nganjuk Siti Nurhayati, Bupati Majalengka Tuty Hayatip, Bupati Kebumen yang kini menjabat wakil gubernur Jawa Tengah Rustriningsih, dan Bupati Minahasa Tenggara Telly Tjanggalung.

Pemimpin perempuan lainnya Bupati Tabanan Bali Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Bantul Sri Surya Widati, Bupati Tangerang Selatan Airin Rachmi, Wali Kota Tebingtinggi Rohani Darus Daniel, dan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Beberapa nama di atas merupakan keterwakilan dari perempuan dalam perebutan jabatan politik melalui pilkada. Jumlah itu masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kepala daerah yang didominasi kaum laki-laki.

Pilpres dua periode terakhir hanya menempatkan Megawati sebagai satu-satunya calon presiden dari kaum hawa. Titik awal pemimpin muda pada periode 2014 dapat dijadikan test case pertama bagi calon-calon pemimpin wanita di negeri ini. Keterwakilan perempuan dalam perebutan jabatan eksekutif berbanding terbalik dengan peluang dan jatah 30% bagi perempuan untuk duduk di legislatif.

Nama-nama yang mulai dimunculkan dalam Pilpres 2014 belum sebanyak calon laki-laki. Selain Megawati, nama Puan Maharani, Sri Mulyani, dan putri-putri lain dari Presiden Soekarno dan Soeharto turut meramaikan bursa pencalonan.

### **Faktor Penyebab**

Timbul pertanyaan kemudian mengapa keran pemimpin perempuan di Indonesia macet? Ben Agger (2003) dalam bingkai teori psikologi sosial berbicara mengenai konsep diri pribadi dan hubungan interpersonal. Perempuan cenderung untuk menempatkan dan memosisikan diri di bawah laki-laki (inferior). Korelasinya hubungan interpersonal yang dibentuk selalu mengedepankan kepentingan lelaki.

Perempuan juga memiliki kodrat alamiah mengasuh keluarga. Beban mengatur rumah tangga dan mengurus anak dalam konsep ketimuran selalu menjadi tanggung jawab perempuan. Di lain pihak, pola berpikir kaum laki-laki, sejak berabad-abad silam masih menganggap perempuan sebagai subordinat dan menyudutkan perannya melalui doktrin adat, budaya, dan agama.

Walaupun peraturan perundangan sudah mengakomodasi peran perempuan dalam politik, kondisi ini belum mampu mengubah realitas peran perempuan dalam lembaga politik. Kendala perjuangan untuk menempatkan representasi dan peran politiknya dalam lembaga-lembaga politik disebabkan ketidaksiapan perempuan memasuki dunia politik, kompetisi internal partai politik, dan kompetisi di antara perempuan itu sendiri.

Faktor eksternal menjadi kendala lain seperti budaya patriarkat yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan dan masih banyaknya dianut paradigma bahwa dunia politik adalah kotor dan hanya cocok untuk laki-laki.

### **Peluang Perempuan**

Dalam Pilpres 2014, peluang perempuan sama besarnya dengan laki-laki. Tiga modal dasar yakni modal politik, sosial, dan finansial masih menjadi faktor utama kemenangan. Menurut hemat penulis, peran penunjang tidak terlepas dari, pertama, ditentukan profil kandidat itu sendiri, jaringan, dan kekuatan keluarga. Kecantikan kadang bisa menjadi bahan pertimbangan selain kemampuan dan kecerdasannya. Jaringan serta keluarga besar juga jadi alasan pemilih untuk menjatuhkan pilihannya.

Kedua, peran media massa. Media massa bisa menggiring masyarakat untuk memilih pemimpin perempuan yang dianggap punya kemampuan dan

berpeluang menang. Ketiga, tokoh masyarakat dan ulama untuk menepis anggapan bahwa perempuan tak boleh menjadi pemimpin. Lebih arif bila para tokoh bisa menjelaskan posisi perempuan dalam kehidupan sosial.

Keempat, peran partai politik pengusung. Seberapa jauh mesin partai mengondisikan terpilihnya calon perempuan dan bagaimana partai menjelaskan program yang relevan bagi masyarakat. (Sumber: Lampung Post, 29 Mei 2012).

Tentang penulis:

[Robi Cahyadi Kurniawan, Dosen FISIP Universitas Lampung.](#)



Iklan

AUTOMATTIC

**You don't need to go to an office to write code. Work with us!**

APPLY

Icons: WordPress, GitHub, A, Power, WOOD, L, S, P

[Report this ad](#)

AUTOMATTIC

**We're hiring PHP developers anywhere in the world. Join us!**

APPLY

Icons: WordPress, GitHub, A, Power, WOOD, L, S, P

[Report this ad](#)

★ Suka

Jadilah yang pertama menyukai ini.

**Terkait**

<a href="#">Syarat Gubernur dalam Pengamat</a>	<a href="#">Calon "Artikel</a>	<a href="#">Agenda Politik 2014 dalam Pengamat</a>	<a href="#">Politik Nepotisme dalam "Artikel Pengamat</a>
--	--------------------------------	--	---